



# Laporan

# Pengarusutamaan Gender

**“MELANGKAH MENUJU  
LAYANAN RESPONSIF GENDER”**

# DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Pendahuluan	1
Prasyarat Implementasi PUG Gambar/Foto disertai dengan	3
a. Komitmen Pimpinan	3
b. Kebijakan Responsif Gender	4
c. Kelembagaan PUG	11
d. Sumber Daya Manusia dan Anggaran	12
e. Data Terpilah	13
f. Alat Analisis Gender	14
g. Kegiatan Partisipasi Masyarakat	15
Inovasi	17
Kesimpulan dan Rencana Kedepan	17
Lampiran	18
Lembar Kerja GAP dan POP KPPN Madiun	
Gender Budget Statement KPPN Madiun	
Data Terpilah/Statistik Gender KPPN Madiun	

# Pendahuluan

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di KPPN Madiun adalah dalam rangka upaya melaksanakan amanat regulasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, sehingga diharapkan pegawai KPPN Madiun nantinya mampu memberikan layanan terbaik dalam akses, kesempatan dan manfaat atas kebijakan kepada mitra kerja dan pemangku kepentingan tanpa terkendala oleh kondisi kodratnya.

## Dasar Hukum

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 270/M.PPN/11/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4379A/SJ, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor SE-46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-116/PB/2017 Tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-4178/PB/2018 tanggal 6 Juni 2018 hal Standar Operasional Prosedur (SOP) Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkup DJPb.

## Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender

1. *Stereotype* gender, misalnya petugas *front* perempuan, karena luwes dan lebih teliti.
2. Subordinasi gender, misal dalam kasus penugasan luar kota dan kesempatan sekolah, jika perempuan harus ijin suami, sedangkan jika suami yang ditugaskan ke luar kota atau sekolah tidak perlu ijin istri terlebih dahulu, karena kesempatan sekolah dan karir lebih utama laki-laki selaku pencari nafkah utama (kepala keluarga).
3. Beban ganda, yaitu mengurus rumah tangga dan keluarga seolah-olah tanggung jawab perempuan, sehingga perempuan terbatas waktu dalam menjalankan tugas kantor di luar jam kerja (lembur);

4. Sarana dan prasarana layanan belum optimal dalam mengakomodir responsif gender, misal untuk pegawai yang sakit, perempuan yang hamil atau menyusui belum tersedia sarana memenuhi kebutuhannya

# Prasyarat Implementasi PUG

## a. Komitmen Pimpinan

Pada tanggal 15 Agustus 2022, seluruh pegawai KPPN Madiun mengadakan kegiatan Penandatanganan Piagam Komitmen Bersama Pelaksanaan Pencegahan Tindakan Pelecehan/Kekerasan Seksual di lingkungan KPPN Madiun di ruang aula KPPN Madiun



## b. Kebijakan Responsif Gender

### 1. Kebijakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi DJPb

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun adalah unit eselon III di bawah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur dalam struktur organisasi pada Kementerian Keuangan berkewajiban juga untuk mengimplementasikan PUG dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di lingkup wilayah kerjanya.

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Tujuan PUG adalah mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu kesetaraan gender (*gender equality*) mengandung arti kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan dan kesamaan dalam menikmati hasil yang seimbang. Sedangkan keadilan gender (*gender equity*) mengandung arti perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, dan hambatan sebagai perempuan dan laki-laki.

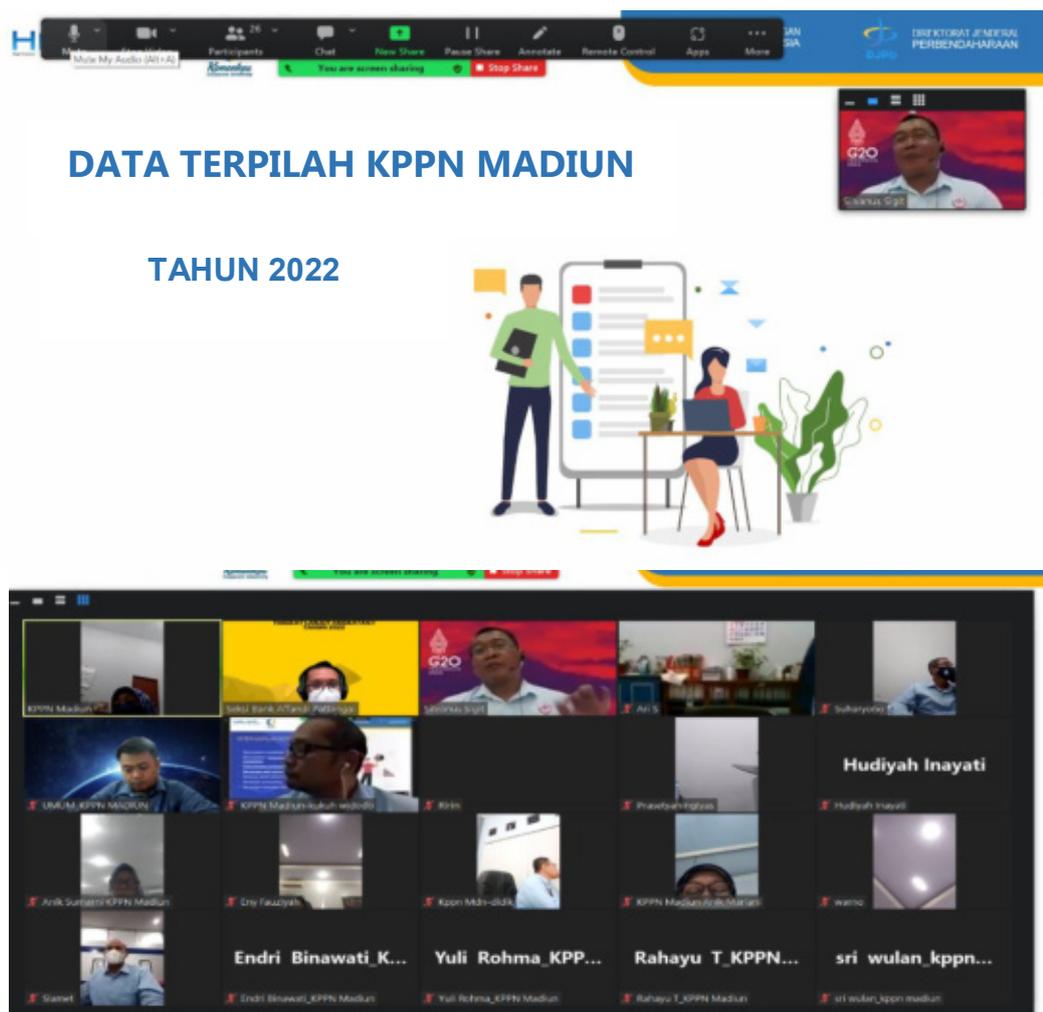
Memberikan layanan prima kepada mitra kerja dan pemangku kepentingan merupakan salah satu tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun baik dalam pelaksanaan anggaran APBN, permintaan data realisasi, dan pendampingan. Berupaya memenuhi kebutuhan satker/stakeholder dan pegawai adalah strategi KPPN Madiun dalam memberikan layanan unggul. Jumlah mitra kerja penerima layanan antara laki-laki dan perempuan bisa dikatakan berimbang, dan petugas yang memberikan layanan pun berimbang antara petugas perempuan dan laki-laki dengan perbandingan 50%:50%. Menyadari perbedaan kebutuhan, KPPN Madiun terus berupaya menerapkan layanan yang responsif gender, guna mengatasi adanya perbedaan kebutuhan baik mitra kerja dan pegawai, sehingga masing-masing pihak mendapatkan akses, kesempatan dan manfaat atas program KPPN, dan baik mitra kerja maupun pegawai dapat menjalankan perannya tanpa terkendala oleh jenis kelamin. Diharapkan mitra kerja akan puas dengan layanan yang diberikan oleh pegawai KPPN.

Kebijakan yang dilaksanakan di KPPN Madiun antara lain:

#### a) Kebijakan pelaksanaan perjalanan dinas.

Mengutamakan kesempatan bagi pegawai perempuan yang masih mempunyai kewajiban menyusui untuk melaksanakan perjalanan dinas ke tujuan yang tidak terlalu jauh dengan tempat tinggalnya;

- b) Kebijakan pelaksanaan pengantaran pulang bagi pegawai perempuan yang melaksanakan kerja lembur hingga malam hari;
  - c) Menyediakan ruang istirahat dan ruang makan untuk pegawai yang dapat digunakan pada saat jam istirahat;
  - d) Menyediakan mushala dan tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan;
  - e) Menyusun Data Terpilah setiap tahun dan *Gender Budget Statement (GBS)*.
  - f) Mengimplementasikan *Activity Based Workplace (ABW)* dengan konsep *Flexible, Responsive, Smart, dan Healthy (FRESH)* Office.
2. Kegiatan dan Sarana Komunikasi Informasi dan Edukasi PUG
- a) Mengadakan kegiatan Gugus Kendali Mutu terkait data terpilah tahun 2022 KPPN Madiun oleh Duta Pengarusutamaan Gender (PUG) KPPN Madiun.



- b) Mengadakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) GKM terkait SE-36/MK.1/2020 tentang Pencegahan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja kepada seluruh pegawai KPPN Madiun oleh Duta Pengarusutamaan Gender (PUG) KPPN Madiun, Affandi Pattangai.

**Imbauan**

Setiap Pegawai

di lingkungan Kementerian Keuangan agar meningkatkan kepekaan dan kesadaran dalam hal menghindari dan/atau mencegah terjadinya Pelecehan Seksual di lingkungan Kementerian Keuangan.

Zoom Meeting | 28:44 | View

Participants: 27

2\_12\_Agustina R

2\_12\_Agustina R

Prasastiingtyas

Kuliah Wibisono\_KPPN Madiun

PuspikantiA

KPPN Madiun\_Ari Susanto

Zoom Meeting | 28:52 | View

Participants (27)

2\_12\_Agustina R (m)

KPPN Madiun (host)

KPPN Madiun\_Ari Susanto

Shamus Digi

Arif Sumardi\_KPPN Madiun

Endri Binawati\_KPPN Madiun

Endri Wajaya\_KPPN Madiun

Hudiyah Inayati\_KPPN Madiun

Infinix HOT 8

KPPN MADIUN-sigl hari wibisono

KPPN Madiun\_Ari Susanto

Kppn madiun\_d&k

KPPN Madiun

kppnmadiun

Zainul Musarofah

Yuli Rohma\_KPPN...

KPPN MADIUN-sigl...

KPPN MADIUN-sigl hari wibisono

Zoom Meeting | 29:46 | View

Participants (27)

2\_12\_Agustina R (m)

KPPN Madiun (host)

KPPN Madiun\_Ari Susanto

Shamus Digi

Arif Sumardi\_KPPN Madiun

Endri Binawati\_KPPN Madiun

Endri Wajaya\_KppMadiun

Hudiyah Inayati\_KPPN Madiun

Infinix HOT 8

KPPN MADIUN-sigl hari wibisono

KPPN Madiun\_Ari Susanto

Kppn madiun\_d&k

KPPN Madiun

kppnmadiun

Zainul Musarofah

Yuli Rohma\_KPPN...

KPPN MADIUN-sigl...

Suharno

Infinix HOT 8

Para pegawai KPPN Madiun aktif mengikuti beberapa kegiatan bertemakan Pengarusutamaan Gender yang diselenggarakan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selama tahun 2022 melalui media *zoom* maupun melalui *channel youtube* Kementerian Keuangan RI dan DJPb.



c) Sarana dan Prasarana

Saat ini di tahun 2022, KPPN Madiun telah mengimplementasikan *Activity Based Workplace* (ABW) dengan konsep *Flexible, Responsive, Smart, dan Healthy* (FRESH) Office sesuai Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep-97/PB/2021.

Implementasi FRESH Office di KPPN Madiun melalui standardisasi ruang *Front Office* diantaranya dengan menyediakan sarana prasarana area *Stakeholder Lounge* untuk memberikan layanan perbendaharaan dan layanan konsultatif/bimbingan/asistensi kepada *stakeholders* yang hadir secara fisik dan area *self service* yang dapat digunakan oleh *stakeholders* yang hadir secara fisik, guna menunjang proses pelayanan di *Stakeholders Lounge*.

Adanya penerapan konsep Fresh Office, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas, output dan kinerja para pegawai dan mitra kerja KPPN Madiun.





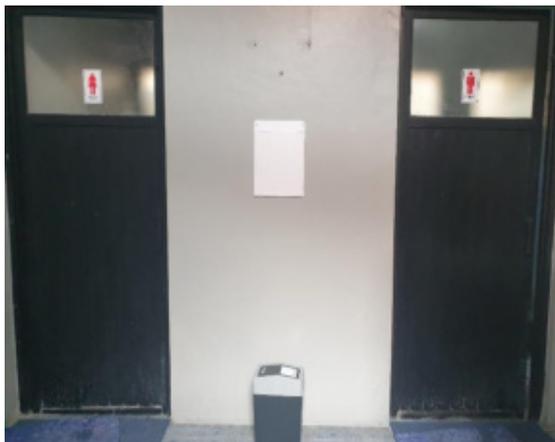
Gambar Ruang Layanan KPPN Madiun



Ruang Makan/Ruang Istirahat/Ruang Poliklinik



Tempat Wudhu yang terpisah



Ruang Kamar Mandi



Tempat Parkir dan Jalur Khusus Disabilitas

d) Kegiatan Pendukung Lainnya

Setiap hari Jumat diadakan kegiatan Jumat Krida dalam rangka meningkatkan kualitas kebugaran para pegawai KPPN Madiun, selain dapat meningkatkan kesehatan, olahraga juga dapat menyegarkan pikiran setelah melakukan pekerjaan rutin selama lima hari kerja.



c. Kelembagaan PUG

1. Kepala KPPN Madiun telah menunjuk dan menetapkan Duta PUG Tahun sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perendaharaaan Negara Madiun Nomor KEP-13/WPB.16/KP.07/2021 tanggal 15 Oktober 2021 (SK telah diunggah di Aplikasi SIPEGIKU);
2. Kepala KPPN Madiun telah membentuk Tim Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun Nomor KEP-18/KP.07/2022 tanggal 21 Januari 2022 (SK telah diunggah di Aplikasi SIPEGIKU);

3. Kepala KPPN Madiun telah melakukan perubahan pertama atas KEP-18/WPB.16/KP.07/2022 tentang Tim Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun karena adanya mutasi pejabat pengawas di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yaitu dengan KEP-56/KPN.1607/2022 (SK telah diunggah di Aplikasi SIPEGIKU);
4. Kepala KPPN Madiun telah melakukan perubahan kedua atas KEP-18/WPB.16/KP.07/2022 tentang Tim Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun karena adanya mutasi pejabat pengawas di lingkungan Ditjen Perbendaharaan yaitu dengan KEP-84/KPN.1607/2022 tanggal 11 November 2022 (SK telah diunggah di Aplikasi SIPEGIKU);

d. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran

1. SDM

Berdasarkan database Aplikasi HRIS (Human Resources Information System) Kementerian Keuangan per Desember 2022, jumlah SDM KPPN Madiun ada 32 pegawai (14 Laki-laki dan 18 Perempuan) dengan komposisi sebagai berikut:

a) SDM berdasarkan jabatan

Jabatan	L	P
Eksekutif III	1	0
Eksekutif IV	2	2
Fungsional Tertentu	1	0
Fungsional Umum	10	15
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>18</b>

Sumber data: Aplikasi SIPEGIKU (diakses tanggal 19 Desember 2022)

b) Berdasarkan Tingkat Pendidikan

The screenshot shows the SIPEGIKU application interface. The main content area displays a table titled 'Prasyarat PUG' (Prerequisites for PUG). The table is organized into columns: 'Kandungan Tampilan' (Content Display), 'Kategori yang Terpapar Gender' (Gender Exposed Categories), 'Keterampilan PUG' (PUG Skills), 'Sumber Data' (Data Source), 'Data Terpilah' (Disaggregated Data), 'Aksi Analisis Gender' (Gender Analysis Action), and 'Partisipasi Masyarakat' (Community Participation). The 'Sumber Data' column is highlighted with a blue header 'Sumber Data Menurut dan Program'. Below this, there are two sub-tables: 'SDM (Level UHC)' and 'SDM berdasarkan Pendidikan' (SDM by Education Level). The 'SDM berdasarkan Pendidikan' table shows the following data:

Pendidikan	%	#
SD	2	0
S1/IV	5	12
DIK	1	2
DIVSAU	6	4
Total	14	18

At the bottom of the table, there are buttons for 'Simpan Data' (Save Data) and 'Refresh Data' (Refresh Data).

Sumber data: Aplikasi SIPEGIKU (diakses tanggal 19 Desember 2022)

2. Anggaran

Untuk alokasi anggaran didalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPPN Madiun Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2,269,852,000. Dalam dokumen Gender Budget Statement (GBS) KPPN Madiun terdapat dana sebesar Rp49,360,000 yang dialokasikan untuk **Ruang Istirahat/Ruang makan pegawai yang memadai** dan **Ruang Kreativitas/santai pegawai** (data GBS dan Lembar kerja GAP dan POP terlampir).

e. Data Terpilah

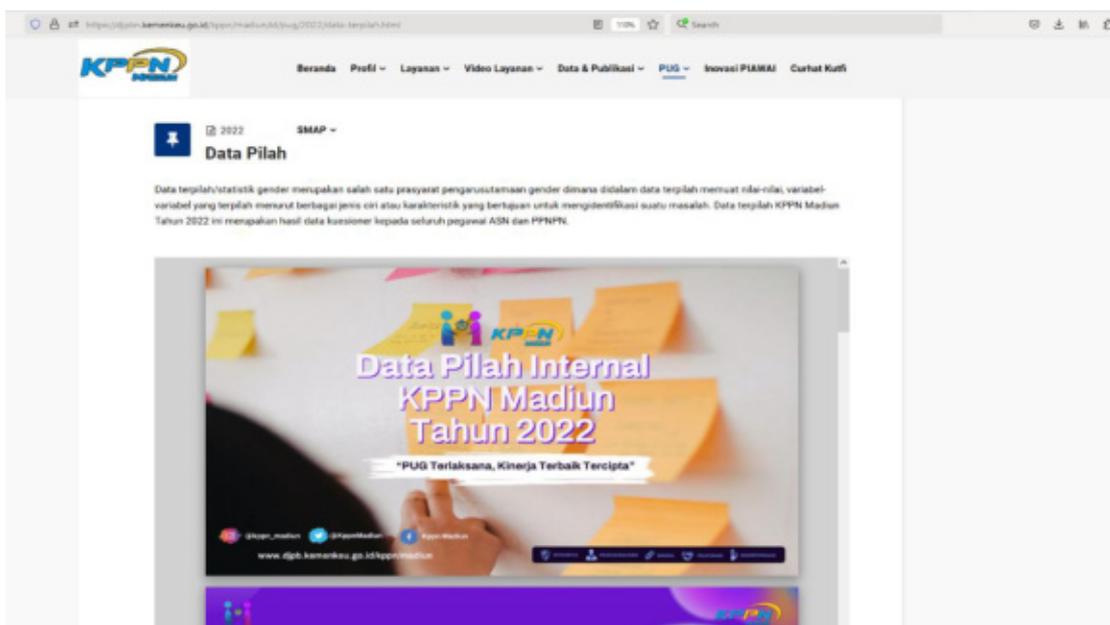
The infographic is titled 'Data Pilah KPPN Madiun Tahun 2022'. It features a central graphic of a laptop displaying a bar chart with four categories: 'Usia' (Age), 'LIP' (Gender), 'Kesehatan' (Health), and 'Pendidikan' (Education). A magnifying glass is positioned over the chart, focusing on a person icon. The text on the left explains that disaggregated data consists of values and variables categorized by various characteristics to identify a problem. The KPPN Madiun logo is visible in the top right corner.

**Data Pilah**  
Merupakan nilai-nilai, variabel-variabel yang terpilah menurut berbagai jenis ciri atau karakteristik yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah.

Pada awal tahun 2022, KPPN Madiun telah menyusun data terpilah (statistik gender). Data terpilah KPPN Madiun tahun 2022 ini merupakan hasil data kuesioner yang dibagikan kepada seluruh Aparatur Negeri Sipil (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Data terpilah/statistik gender merupakan salah satu prasyarat pengarusutamaan gender dimana didalam data terpilah memuat nilai-nilai, variabel-variabel yang terpilah menurut berbagai jenis ciri atau karakteristik yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah (Data terpilah/statistik gender tahun 2022 terlampir).

Data terpilah/statistik gender KPPN Madiun tahun 2022, telah ditampilkan dan dapat diakses di situs Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun dengan alamat: <https://djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/madiun/id/pug/2022/data-terpilah.html>.



#### f. Alat Analisis Gender

Alat Analisis Gender merupakan salah satu prasyarat Pelaksanaan PUG di KPPN Madiun. Untuk Tahun 2022, telah dilaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan responsif gender, berupa ruang istirahat/ruang makan dan ruang media social dan kreativitas.

Adapun analisi situasinya adalah Pegawai (kelompok rentan) dan berkebutuhan khusus = Pegawai usia produktif = 10 orang; Pegawai Dewasa Madya (41-60 thn) = 27 orang; Pegawai pernah sakit sedang dan berat = 6 orang; Pegawai berada di kantor di jam istirahat = 19 orang; Pegawai berlokasi jauh dari kantor = 6 orang mendapat perlakuan sama dengan pegawai lainnya. Dengan tersedianya sarpras responsif gender kelompok sasaran akan mendapatkan akses dan manfaat terhadap layanan KPPN. Tujuan akhir meniadakan atau meminimalisir terjadinya kesenjangan gender, sehingga proses layanan dapat terwujud dengan cepat dan tepat.





## Inovasi

KPPN Madiun telah membuat mini kuis GEMINI (*Gender Mainstreaming Internalisation And Initiative*) yang dapat diakses dari gawai setiap pegawai. Setiap pegawai KPPN Madiun untuk mengikuti mini gamesnya dengan membukan tautan yang disampaikan oleh Duta PUG dan telah tersedia di situs KPPN Madiun dengan alamat: <https://djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/madiun/id/pug/2022/implementasi.html>. Adapun materi mini kuis ini berasal dari buku saku PUG Kementerian Keuangan yang telah dibagikan ke seluruh pegawai KPPN Madiun.

## Kesimpulan dan Rencana Kedepan

### Kesimpulan

KPPN Madiun menempati gedung yang terletak di Jalan Salak Nomor 52, Taman Kota Madiun dengan sarana dan prasarana yang didesain ramah terhadap Pengarusutamaan Gender dan Laki-Laki Ramah Perempuan Berkarir. KPPN Madiun juga telah mengimplementasikan PUG dalam hal pelayanan kepada mitra kerja dan pelayanan internal.

### Rencana Kedepan

Untuk tahun 2023, rencana kegiatan PUG di KPPN Madiun diantara peningkatan sarpras yang ada saat ini, sinergi dengan instansi vertikal Kementerian Keuangan yang ada di Kota Madiun terkait implementasi PUG, dan penyusunan data terpilah/statistik gender.

Lampiran

**Lembar Kerja GAP & POP KPPN Madiun  
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender**

<b>Tahap I: Analisa Kebijakan yang Responsif Gender</b>	<b>Kolom 1</b>	Kebijakan/Program /Kegiatan		Pengelolaan Perbendaharaan Negara
	<b>Kolom 2</b>	Data Pilah (Pembuka Wawasan)		Data Terpilah Jumlah Pegawai KPPN Madiun : KPPN <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pegawai ASN KPPN = 40 (L17, P20)</li> <li>b. Pegawai PPNPN = 10 (L9, P1)</li> <li>c. Pegawai usia produktif = 10 orang</li> <li>d. Pegawai Dewasa Madya (41-60thn) = 27 orang</li> <li>e. Pegawai pernah sakit sedang dan berat = 6 orang</li> <li>f. Pegawai berada di kantor di jam istirahat = 19 orang</li> <li>g. Pegawai berlokasi jauh dari kantor = 6 orang</li> </ul>
	<b>Kolom 3</b>	<b>Isu Gender</b>	Faktor Kesenjangan	Pegawai (kelompok rentan) = sakit sedang sampai berat 6 orang, menurun kesehatan fisiknya (dewasa madya), dan usia produktif mendapat perlakuan sama dengan pegawai lainnya.
	<b>Kolom 4</b>		Sebab Kesenjangan Internal	Secara regulasi dan penyediaan sarana dan prasarana tidak terdapat perbedaan perlakuan, antara pegawai kategori kelompok rentan dengan pegawai lainnya.
	<b>Kolom 5</b>		Sebab Kesenjangan Eksternal	Petugas Satker harus menjalani tugas pengajuan pencairan dana dan bimbingan pelaksanaan anggaran ke KPPN.
<b>Tahap II: Formulasikan Kebijakan</b>	<b>Kolom 6</b>	<b>Kebijakan dan Rencana Ke depan</b>	Reformulasi Tujuan	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan responsif gender, bagi kelompok rentan (Pegawai):  <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ruang Istirahat/Ruang makan Pegawai yang memadai</b></li> <li>- <b>Ruang Kreativitas/santai Pegawai</b></li> </ul>

<b>Tahap III: Pengukuran Hasil</b>	<b>Kolom 7</b>		Rencana Aksi	Mengusulkan proposal (TOR/RAB) penyediaan sarpras pendukung layanan bagi kelompok rentan (DIPA Pemeliharaan Gedung)
	<b>Kolom 8</b>	<b>Pengukuran Hasil</b>	Data Dasar ( <i>Baseline</i> )	Kelompok rentan atau berkebutuhan khusus KPPN : a. Pegawai usia produktif = 10 orang b. Pegawai Dewasa Madya (41-60 thn) = 27 orang c. Pegawai pernah sakit sedang dan berat = 6 orang d. Pegawai berada di kantor di jam istirahat = 19 orang e. Pegawai berlokasi jauh dari kantor = 6 orang
	<b>Kolom 9</b>		Indikator Gender	Tersedianya sarana dan prasarana yang responsif gender masing-masing 1 (satu) unit

Madiun, 6 September 2022  
Kepala KPPN Madiun,



Kutfi Jusmintari

## Gender Budget Statement (GBS) KPPN Madiun

Kementerian/Lembaga	: Kementerian Keuangan RI	
Unit Organisasi	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan	
Satker	: KPPN Madiun	
Program	: Pengelolaan Perbendaharaan Negara	
Kegiatan	: Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
Output Kegiatan	: Layanan Prasarana Internal (Pemeliharaan Gedung dan Bangunan)	
Tujuan	: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan responsif gender, bagi kelompok rentan (Pegawai): - <b>Ruang Istirahat/Ruang makan pegawai yang memadai</b> - <b>Ruang Kreativitas/santai pegawai</b>	
Analisis Situasi	: Pegawai (kelompok rentan) dan berkebutuhan khusus = Pegawai usia produktif = 10 orang; Pegawai Dewasa Madya (41-60 thn) = 27 orang; Pegawai pernah sakit sedang dan berat = 6 orang; Pegawai berada di kantor di jam istirahat = 19 orang; Pegawai berlokasi jauh dari kantor = 6 orang mendapat perlakuan sama dengan pegawai lainnya. Dengan tersedianya sarpras responsif gender kelompok sasaran akan mendapatkan akses dan manfaat terhadap layanan KPPN. Tujuan akhir meniadakan atau meminimalisir terjadinya kesenjangan gender, sehingga proses layanan dapat terwujud dengan cepat dan tepat.	
Rencana Aksi	Komponen input	1. Menyusun Hasil Kuesioner menjadi Data Terpilah 2. Pengajuan usulan pengadaan sarpras ke KPA 3. Menata dan mengoptimalkan sarpras agar berfungsi sesuai harapan

Alokasi Anggaran Output	Alokasi dana yang dibutuhkan sebesar Rp 49.360.000,-
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Tersedianya sarpras yang dibutuhkan, agar pelayanan terbaik dapat terwujud; karena permasalahan, hambatan, dan kebutuhan kelompok sasaran yang mengganggu kinerja akan terselesaikan, sehingga proses pelaksanaan anggaran (proses pencairan dana) dapat berjalan dengan lancar.

Madiun, 6 September 2022  
Kepala KPPN Madiun



Kutfi Jusmintari

### Gender Budget Statement (GBS) KPPN Madiun

Program	: Pengelolaan Perbendaharaan Negara
Kegiatan	: Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Output Kegiatan	: Layanan Prasarana Internal (Pemeliharaan Gedung dan Bangunan)
Tujuan	: Penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan responsif gender, Bagi kelompok rentan (Pegawai): - Ruang Istirahat - Ruang Medsos dan Kreativitas
Analisis Situasi	: Pegawai (kelompok rentan) dan berkebutuhan khusus = Pegawai usia produktif = 10 orang; Pegawai Dewasa Madya (41-60 thn) = 27 orang; Pegawai pernah sakit sedang dan berat = 6 orang; Pegawai berada di kantor di jam istirahat = 19 orang; Pegawai berlokasi jauh dari kantor = 6 orang mendapat perlakuan sama dengan pegawai lainnya. Dengan tersedianya sarpras responsif gender kelompok sasaran akan mendapatkan akses dan manfaat terhadap layanan KPPN. Tujuan akhir meniadakan atau meminimalisir terjadinya kesenjangan gender, sehingga proses layanan dapat terwujud dengan cepat dan tepat.
Rencana Aksi	: Komponen Output 1. Menyusun Hasil Kuesioner, 2. Pengajuan usulan pengadaan sarpras ke KPA, 3. Menata dan mengoptimalkan sarpras agar berfungsi sesuai harapan
Alokasi Anggaran Output	: Alokasi dana yang dibutuhkan sebesar Rp 49.360.000,-
Dampak/Hasil Output Kegiatan	: Tersedianya sarpras yang dibutuhkan, agar pelayanan terbaik dapat terwujud; karena permasalahan, hambatan, dan kebutuhan kelompok yang mengganggu kinerja akan terselesaikan, sehingga proses pelaksanaan anggaran (proses pencairan dana) dapat berjalan dengan lancar



# Data Pilah Internal KPPN Madiun Tahun 2022

**“PUG Terlaksana, Kinerja Terbaik Tercipta”**



@kppn\_madiun



@KppnMadiun



Kppn Madiun

[www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/madiun](http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/madiun)



INTEGRITAS



PROFESIONALISME



SINERGI



PELAYANAN



KESEMPURNAAN



# Visi Misi KPPN Madiun

## ‘VISI

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang Profesional, Modern, dan Akuntabel

## ‘MISI

01

Menjamin Kelancaran Pencairan Dana APBN Secara Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Jumlah.

02

Mengelola Penerimaan Negara Secara Profesional dan Akuntabel.

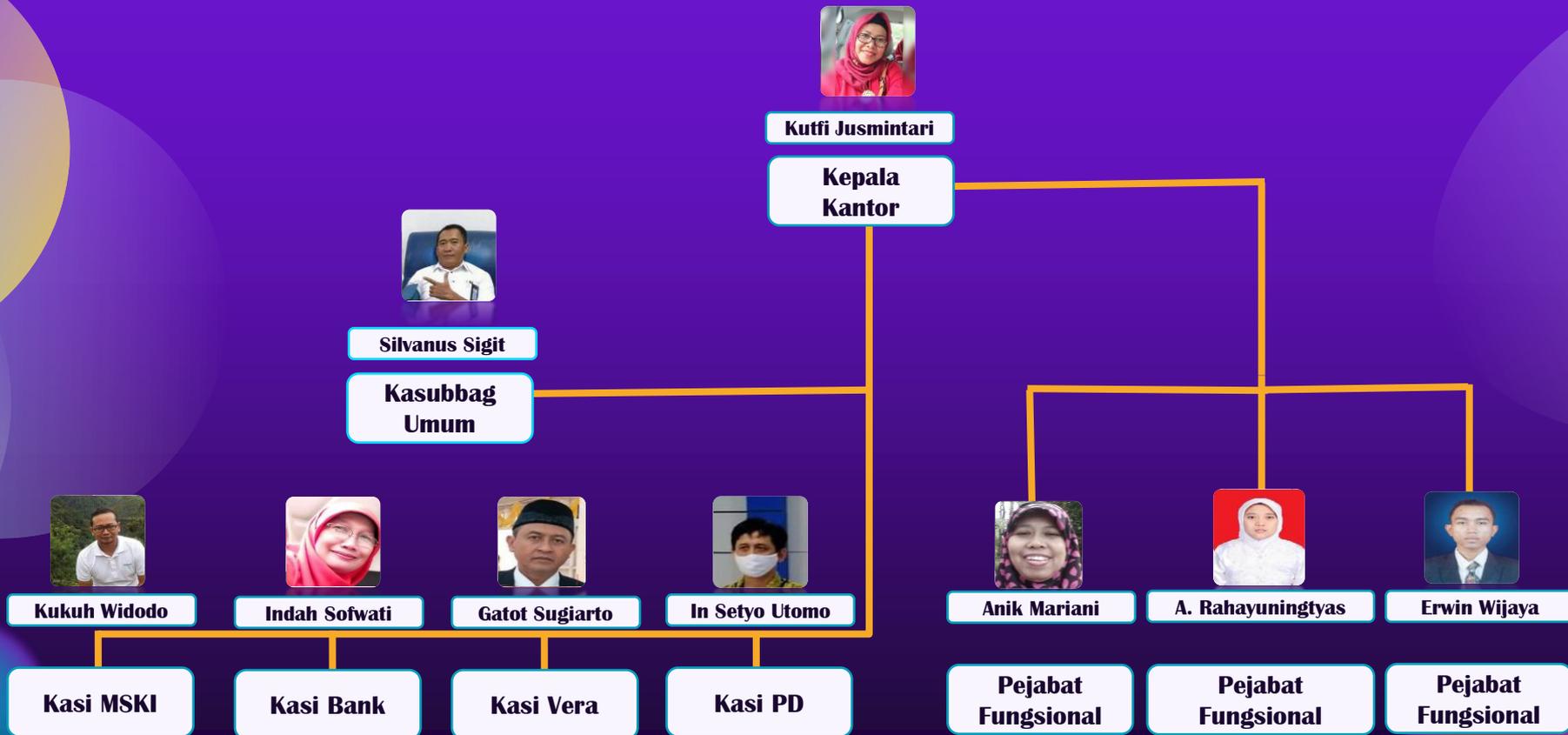
03

Mewujudkan Pelaporan Pertanggungjawaban APBN yang Akurat dan Tepat Waktu.





# Struktur Organisasi KPPN Madiun





1

# Data Pilah Internal

**“Kinerja Baik Tercipta, Keuangan Negara Optimal”**

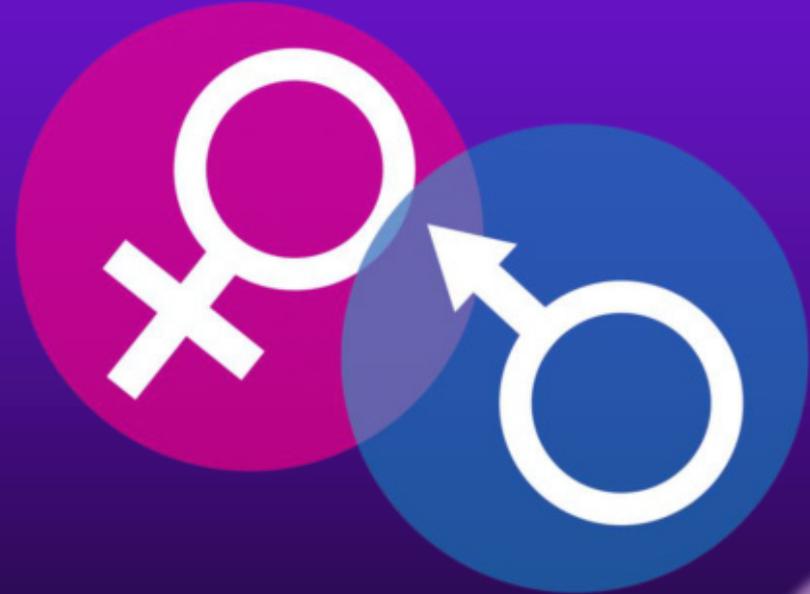




## Definisi Data Pilah

**Data Pilah** merupakan variabel-variabel bernilai yang terpilah menurut berbagai jenis, ciri, atau karakteristik yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah

**Data Pilah** menurut jenis kelamin bertujuan untuk membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender yang berguna dalam menyusun analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender





# Data Pilah Menurut Jenis Kelamin dan Usia

55,32%



17 Orang ASN

9 Orang PPNPN



1 Supir



4 Pramubhakti



4 Satpam

44,78%



20 Orang ASN

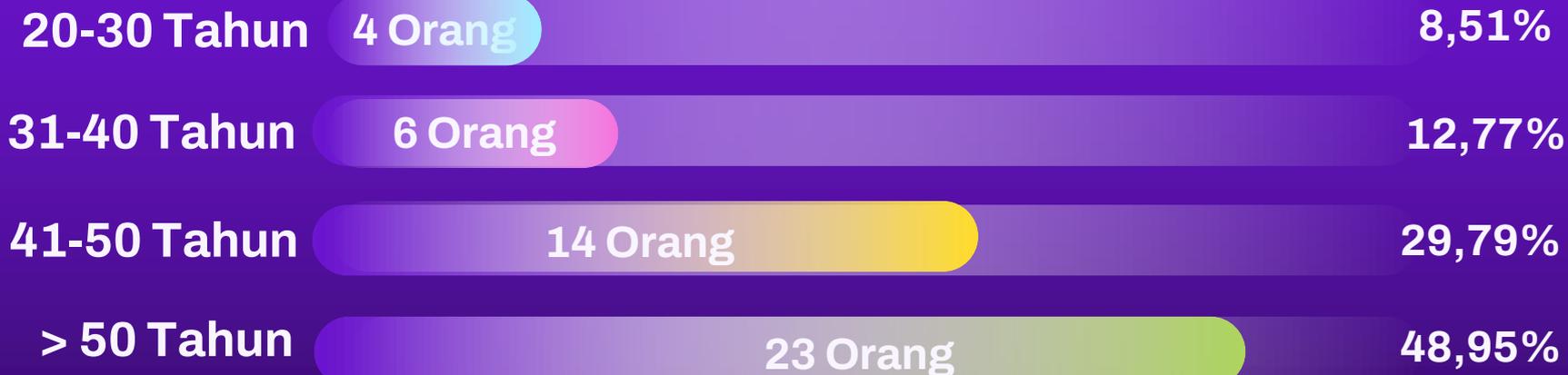
1 Orang PPNPN



Sekertaris KK



# Data Pilah Menurut Karakteristik Usia



20 – 30 Tahun	3 Orang	1 Orang
31 – 40 Tahun	4	2
41 – 50 Tahun	7	7
> 50 Tahun	12	11



# Data Pilah Menurut Jenjang Pendidikan



**SMA**



**D1**



**D3**

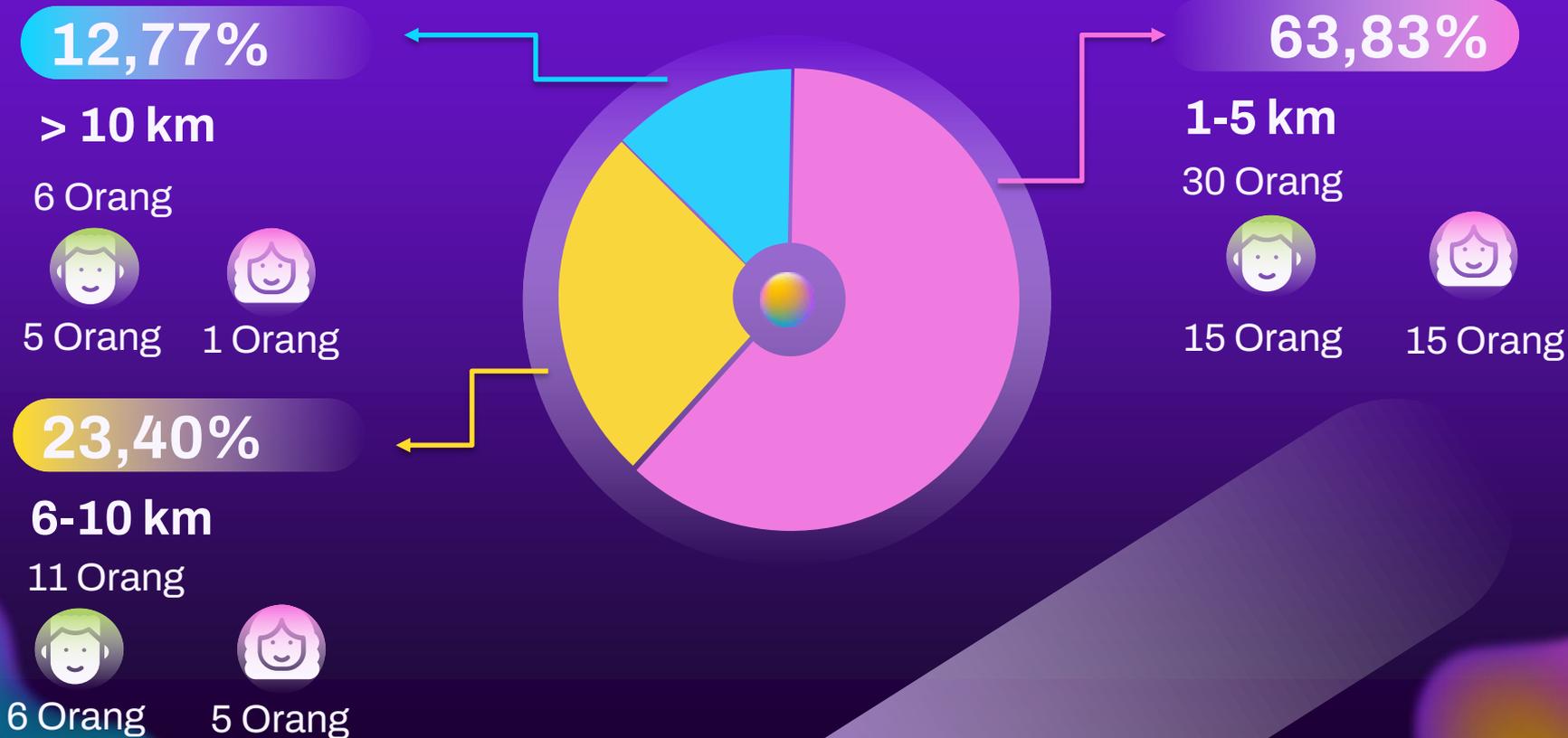


**D4/S1**



**S2**

# Data Pilah Menurut Jarak Tempuh (Rumah ke Kantor)





# Data Pilah Menurut Moda Transportasi



Transportasi

Laki-laki

Perempuan

Total

Persentase



Sepeda Motor

21 Orang

16 Orang

37 Orang

78,72%



Mobil Pribadi

3

4

7

14,89%



Angkutan Umum

1

0

1

2,13%

Lainnya...

1

1

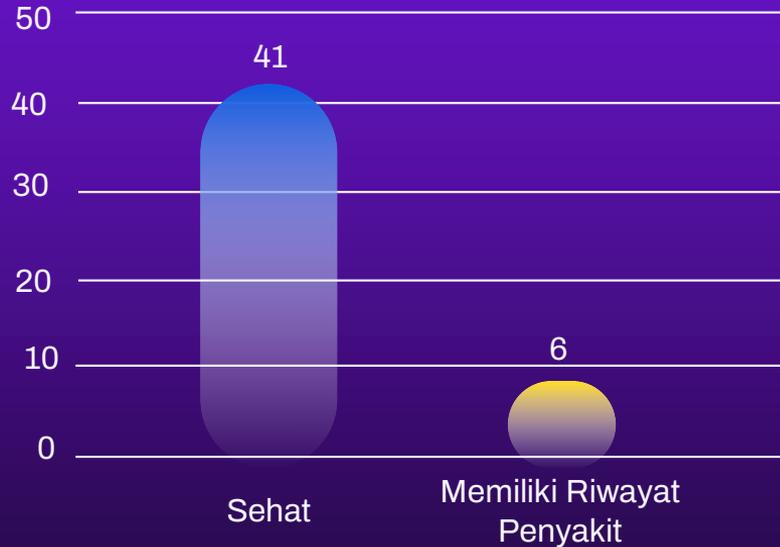
2

4,26%



# Data Pilah Menurut Kondisi Kesehatan

(Orang)



**Keterangan:**

**87,23%**

**21 Laki-laki dan 20 Perempuan** memiliki kondisi sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit

**12,77%**

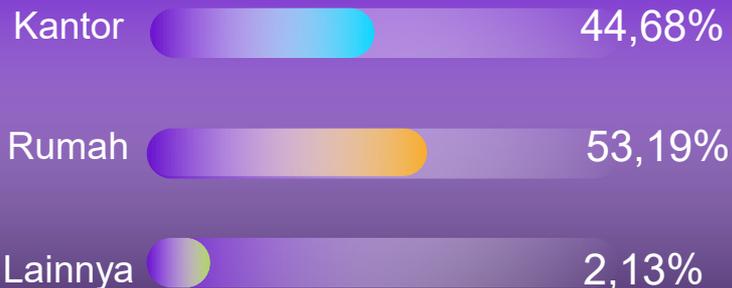
**5 Laki-laki dan 1 Perempuan** memiliki riwayat penyakit, antara lain:

1. Penyakit Jantung
2. Penyakit Diabetes
3. Penyakit Pernafasan
4. Penyakit Darah Tinggi



# Data Pilah Menurut Lokasi Jam Istirahat

## Data Pilah Kategori Lokasi Istirahat Siang

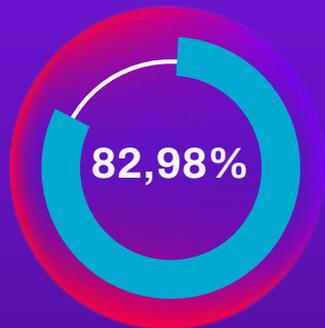


## Data Pilah Kategori Lokasi Makan Siang





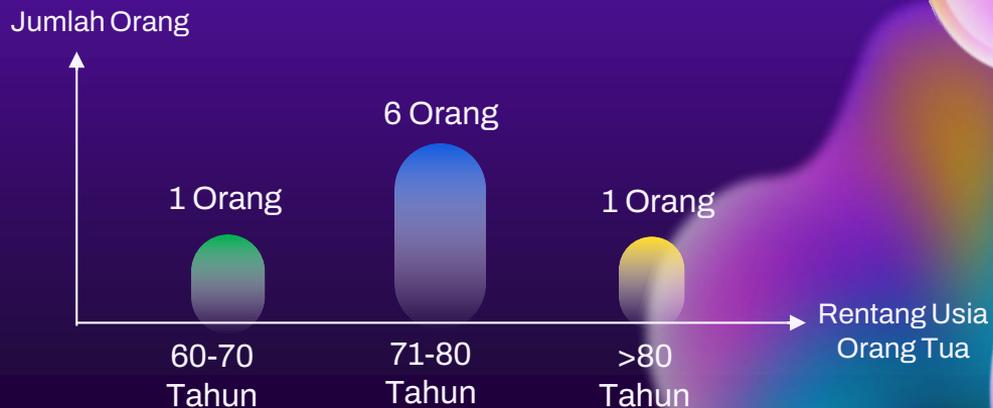
# Data Pilah Tinggal dengan Orang Tua



**Sebanyak 39 Orang** Tidak tinggal bersama orang tua



**8 Orang** tinggal bersama orang tua dengan rincian sebagai berikut:





2

# Data Pilah Opini dan Usulan Internal

**“Keuangan Negara Optimal, Masyarakat Sejahtera”**





# Data Pilah Kenyamanan Sarana dan Prasarana



**43 Orang  
Merasa Nyaman**



**4 Orang  
Belum Nyaman**



# Usul Pegawai Terkait Sarana dan Prasarana

**Beberapa usulan pegawai, sebagai berikut:**

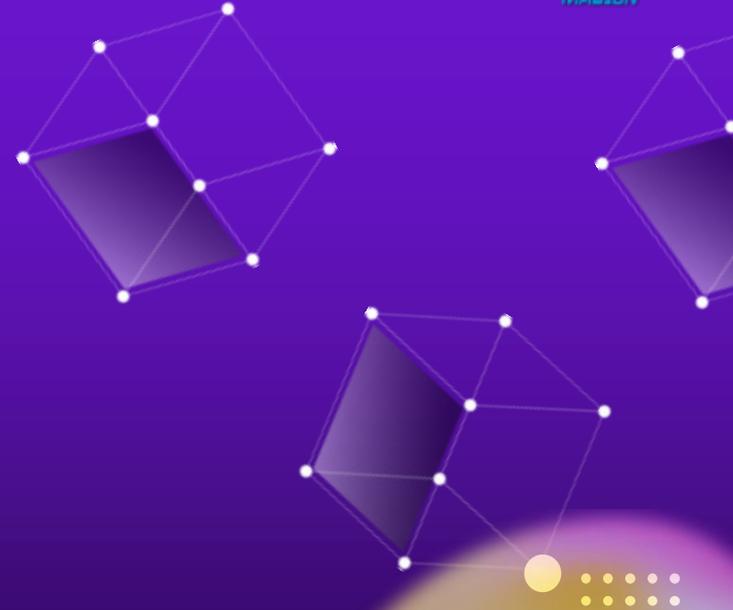
1. Pemisahan lorong kamar mandi tamu untuk gender laki-laki dan perempuan;
2. Pemisahan ruang makan untuk pegawai laki-laki dan perempuan;
3. Pemindahan ruang istirahat atau penambahan ruang istirahat agar tidak satu tempat dengan GKM;
4. Penambahan AC;
5. Perluasan ruang kerja;
6. *Service* sarana prasarana lebih rutin.



# Usul Pegawai Terkait Kesehatan

**Beberapa usulan pegawai, sebagai berikut:**

1. Penyesuaian sarana olahraga terkini, seperti alat fitnes atau lainnya;
2. Jamuan bergizi seminggu sekali dan memperlengkap persediaan obat di klinik;
3. Pemberian vitamin rutin untuk menambah daya tahan tubuh;
4. Pemeriksaan kesehatan secara berkala;
5. Peningkatan sarana kesehatan.





# Usul Pegawai Terkait Pelatihan sebelum Pensiun

**Beberapa usulan pegawai, sebagai berikut:**

1. Pengadaan pelatihan dalam kewirausahaan;
2. Pengadaan pelatihan terkait menjaga kesehatan;
3. Pelatihan agar pegawai pensiun bisa mandiri dalam menjalani masa tua.





# Usul Lainnya Terkait Kebijakan Responsif Gender

**Beberapa usulan pegawai, sebagai berikut:**

1. Melaksanakan acara untuk mengembangkan komitmen yang mendorong Pengarustamaan Gender (PUG);
2. Memperlengkap layout dan fasilitas ruang sesuai dengan standard gender.





**“Kesetaraan gender harus dapat memberikan manfaat yang besar dan penting dari sisi ekonomi dan kualitas masyarakat”**

- Sri Mulyani Indrawati



# Terima Kasih

KPPN Madiun Selalu SEHATI (Sistematis,  
Efektif dan Efisien, Harmonis, Akuntabel,  
dan Transparan)

[www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/madiun](http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/madiun)



@kppn\_madiun



@KppnMadiun



Kppn Madiun